

Implementasi Nilai - Nilai Pancasila dalam Meningkatkan Etika Masyarakat Menggunakan Media Sosial

Riris Nauli Manik¹, Risky Spanyol Nababan², Titin Enjilina Nababan³

^{1,2,3} Universitas Negeri Medan

Korespondensi: titinnababan934@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Pancasila values in improving public ethics in social media use. The development of social media has facilitated communication and information dissemination, but it has also generated ethical challenges, including the spread of unverified information, hate speech, cyberbullying, and privacy violations. This study employs a qualitative approach using a literature review method. Data were drawn from journal articles discussing Pancasila values, digital literacy, communication ethics, and digital citizenship. The data were analyzed using content analysis through the identification, categorization, interpretation, and synthesis of relevant literature. The review indicates that Pancasila values can serve as a normative foundation for promoting ethical social media use through moral responsibility, respect for human dignity, social unity, democratic communication, and justice. The implementation of these values requires support from digital literacy, character education, positive social role models, and responsible platform governance. This study concludes that integrating Pancasila values with digital literacy provides a conceptual framework for fostering respectful, critical, and responsible behavior in digital spaces. However, the direct effect of implementing Pancasila values on changes in public behavior requires further empirical investigation.

Keywords: Pancasila, digital ethics, social media, digital literacy, digital citizenship.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam meningkatkan etika masyarakat menggunakan media sosial. Perkembangan media sosial memberikan kemudahan dalam komunikasi dan penyebaran informasi, tetapi juga menimbulkan persoalan etika, seperti penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, ujaran kebencian, perundungan siber, dan pelanggaran privasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari artikel jurnal yang membahas nilai-nilai Pancasila, literasi digital, etika komunikasi, dan kewarganegaraan digital. Analisis data menggunakan analisis isi melalui identifikasi, pengelompokan, interpretasi, dan sintesis literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan normatif untuk membangun etika bermedia sosial melalui penguatan tanggung jawab moral, penghormatan terhadap martabat manusia, pemeliharaan persatuan, komunikasi demokratis, dan keadilan. Implementasi nilai tersebut perlu didukung oleh literasi digital, pendidikan karakter, keteladanan sosial, serta tata kelola platform yang bertanggung jawab. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dan literasi digital dapat menjadi kerangka konseptual untuk mengembangkan perilaku masyarakat yang santun, kritis, dan bertanggung jawab dalam ruang digital. Namun, pengaruh

langsung implementasi Pancasila terhadap perubahan perilaku masyarakat masih memerlukan pengujian empiris.

Kata kunci: Pancasila, etika digital, media sosial, literasi digital, kewarganegaraan digital.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi, interaksi sosial, dan penyebaran informasi dalam masyarakat Indonesia. Media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan X memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, membangun hubungan sosial, serta berpartisipasi dalam kehidupan publik. Perubahan tersebut memperluas kesempatan masyarakat untuk berkomunikasi tanpa batasan ruang dan waktu. Namun, kemudahan komunikasi digital juga menghadirkan persoalan etika, seperti penyebaran informasi yang belum terverifikasi, ujaran kebencian, perundungan siber, pelanggaran privasi, dan penggunaan bahasa yang merendahkan orang lain. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi belum tentu sejalan dengan kemampuan mempertimbangkan konsekuensi moral dari aktivitas digital. Alfazri dan Syahputra (2024) menjelaskan keterkaitan literasi digital dengan etika komunikasi dalam penggunaan media sosial. Fadhilah et al. (2022) juga mengkaji pengaruh literasi digital terhadap etika bermedia sosial. Kedua kajian tersebut memberikan landasan untuk memahami bahwa perilaku pengguna tidak hanya berkaitan dengan keterampilan mengakses teknologi, tetapi juga dengan kemampuan menerapkan prinsip komunikasi yang bertanggung jawab.

Etika bermedia sosial menjadi persoalan yang perlu dikaji karena setiap tindakan digital dapat menimbulkan konsekuensi bagi individu maupun kelompok. Pengguna dapat menyebarkan informasi dalam waktu singkat, sedangkan proses pemeriksaan kebenaran informasi sering kali tidak memperoleh perhatian yang memadai. Situasi ini dapat memperbesar risiko kesalahpahaman, konflik sosial, dan pembentukan opini berdasarkan informasi yang tidak akurat. Amril dan Sazali (2025) membahas krisis etika komunikasi di media sosial melalui perspektif algoritma, literasi digital, dan regulasi. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan etika digital tidak cukup dijelaskan melalui perilaku individual, tetapi juga perlu mempertimbangkan lingkungan teknologi dan tata kelola komunikasi. Algoritma platform dapat memengaruhi jenis konten yang muncul dalam ruang digital, sedangkan kecenderungan pengguna untuk membagikan konten tanpa pemeriksaan dapat memperluas penyebaran informasi bermasalah. Oleh karena itu, peningkatan etika bermedia sosial memerlukan pendekatan yang menghubungkan tanggung jawab individu, kemampuan literasi digital, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila menyediakan landasan filosofis dan normatif untuk mengarahkan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial, termasuk ketika berinteraksi melalui media sosial. Lima sila Pancasila mengandung prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang dapat menjadi pedoman dalam mengambil keputusan etis di ruang digital. Sila pertama mendorong pengguna mempertimbangkan tanggung jawab moral dalam menyampaikan informasi. Sila kedua menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia dan

penolakan terhadap penghinaan, perundungan, serta diskriminasi. Sila ketiga mengarahkan masyarakat untuk menjaga persatuan dan menghindari penyebaran konten yang memicu permusuhan antarkelompok. Sila keempat mendorong dialog yang rasional, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, dan penyelesaian konflik melalui musyawarah. Sila kelima mengarahkan pengguna untuk memperhatikan keadilan, kesetaraan, serta hak orang lain dalam berkomunikasi. Islamy (2021) mengkaji nilai-nilai Pancasila dalam kode etik netizen Muhammadiyah, sedangkan Silaen dan Najicha (2023) membahas implementasi nilai Pancasila, khususnya prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam penggunaan media sosial. Kedua kajian tersebut memberikan dasar untuk menempatkan Pancasila sebagai pedoman etis dalam membangun perilaku digital yang menghormati martabat manusia.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan media sosial perlu melampaui pemahaman konseptual dan penguasaan pengetahuan tentang lima sila. Masyarakat perlu menerjemahkan nilai tersebut ke dalam tindakan yang dapat diamati, seperti memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, menggunakan bahasa yang santun, menghormati privasi, menghindari diskriminasi, serta menyampaikan kritik berdasarkan alasan yang jelas. Pendekatan ini menempatkan etika sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan ketika pengguna menghadapi berbagai pilihan perilaku di ruang digital. Putri et al. (2025) membahas Pancasila sebagai paradigma dalam membentuk etika komunikasi pada era digital. Que dan Najicha (2025) juga mengkaji Pancasila sebagai pilar etika digital untuk membangun perilaku bermartabat di media sosial. Sejalan dengan itu, Sari et al. (2025) menempatkan Pancasila sebagai dasar etika digital dalam era media sosial. Literatur tersebut mendukung pemahaman bahwa nilai Pancasila dapat menjadi kerangka normatif untuk menilai kesesuaian perilaku digital dengan prinsip penghormatan, tanggung jawab, persatuan, dan keadilan. Namun, penerapan nilai tersebut memerlukan pembiasaan agar prinsip moral tidak berhenti sebagai pengetahuan, melainkan menjadi dasar perilaku sehari-hari.

Literasi digital juga memiliki hubungan erat dengan implementasi nilai Pancasila karena pengguna membutuhkan kemampuan untuk menilai informasi, memahami konteks komunikasi, dan mempertimbangkan dampak tindakannya. Literasi digital mencakup kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara tepat. Kemampuan tersebut membantu pengguna mengenali informasi yang menyesatkan, membedakan fakta dari opini, serta mempertimbangkan kredibilitas sumber sebelum menyebarkan konten. Yosita Ratri dan Aviyanti (2025) mengkaji literasi digital di Indonesia melalui penggunaan berbagai platform media sosial. Alfazri dan Syahputra (2024) menyoroti keterkaitan literasi digital dan etika komunikasi, sedangkan Fadhilah et al. (2022) menelaah hubungan literasi digital dengan etika bermedia sosial. Temuan konseptual dari kelompok penelitian tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kecakapan digital dan tanggung jawab komunikasi. Meskipun demikian, literasi digital dan etika Pancasila memiliki cakupan yang berbeda. Literasi digital membantu pengguna menilai informasi dan mengoperasikan teknologi secara kritis, sedangkan Pancasila menyediakan orientasi nilai untuk menentukan apakah tindakan tersebut sesuai dengan prinsip moral dan kehidupan bersama.

Pembentukan etika digital juga berkaitan dengan konsep digital citizenship atau kewarganegaraan digital. Konsep ini menempatkan pengguna teknologi sebagai warga yang memiliki hak, tanggung jawab, dan kewajiban untuk berpartisipasi secara etis dalam ruang digital. Fatmawati dan Habibah (2023) mengkaji aktualisasi praktik netizenship mahasiswa dalam kerangka kewarganegaraan digital yang baik di Indonesia. Mulyono et al. (2022) membahas keterlibatan warga secara daring melalui media sosial, sedangkan Yusuf et al. (2024) menempatkan Pancasila sebagai sumber etika digital dalam pendidikan kewarganegaraan. Ketiga kajian tersebut memperlihatkan relevansi hubungan antara partisipasi digital, tanggung jawab kewargaan, dan nilai kebangsaan. Pengguna media sosial tidak hanya berperan sebagai penerima dan penyebar informasi, tetapi juga sebagai warga yang turut membentuk kualitas ruang publik digital. Partisipasi yang bertanggung jawab menuntut kemampuan menyampaikan pendapat secara rasional, menghargai hak pengguna lain, serta menghindari tindakan yang merusak kepercayaan dan hubungan sosial.

Tantangan implementasi nilai Pancasila semakin kompleks ketika media sosial menjadi ruang pembentukan identitas, ekspresi politik, dan interaksi antarkelompok. Perbedaan pandangan mengenai agama, politik, budaya, dan persoalan sosial dapat memunculkan perdebatan yang produktif, tetapi juga berpotensi berkembang menjadi konflik ketika pengguna mengabaikan prinsip penghormatan dan tanggung jawab. Mulyono et al. (2024) mengkaji penguatan kewarganegaraan digital melalui analisis wacana kandidat presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Muhajir et al. (2025) membahas penguatan literasi digital dan budaya politik generasi Z melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Kedua kajian tersebut relevan untuk memahami hubungan antara komunikasi digital, partisipasi politik, dan pembentukan sikap kewargaan. Dalam konteks ini, implementasi Pancasila perlu mendorong masyarakat membedakan kritik terhadap gagasan dari serangan terhadap pribadi, menghindari penyebaran informasi yang memecah belah, dan mempertimbangkan dampak sosial dari setiap pernyataan. Dengan demikian, etika digital tidak berarti membatasi kebebasan berpendapat, tetapi mengarahkan kebebasan tersebut agar tetap menghormati hak orang lain dan kepentingan bersama.

Pendidikan Pancasila dapat mendukung proses pembentukan etika digital melalui pengembangan pengetahuan, penalaran moral, dan kebiasaan berperilaku. Akbar (2025) membahas Pancasila pada era digital dalam kaitannya dengan etika dan moralitas demokrasi siber. Nurfitriyanti dan Damayanti (2025) mengkaji pendidikan Pancasila di era digital untuk mengembangkan kewarganegaraan digital dan keadaban siswa. Firmansyah et al. (2025) menyoroti sinergi etika digital dan Pancasila melalui proyek inovasi teknologi digital bagi pelajar. Literatur tersebut membuka ruang untuk mengembangkan pendekatan pendidikan yang tidak hanya menyampaikan materi tentang nilai kebangsaan, tetapi juga melibatkan peserta didik dalam analisis kasus, evaluasi konten, diskusi etis, dan praktik komunikasi bertanggung jawab. Melalui kegiatan tersebut, pengguna dapat mempelajari cara menerapkan nilai Pancasila ketika menghadapi informasi provokatif, perbedaan pendapat, pelanggaran privasi, atau ajakan menyebarkan konten yang belum terverifikasi. Pendekatan ini menghubungkan pengetahuan normatif dengan

keterampilan mengambil keputusan dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas digital.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas literasi digital, etika komunikasi, Pancasila, dan kewarganegaraan digital, kajian mengenai hubungan antarkomponen tersebut masih perlu dikembangkan secara terarah. Penelitian Alfazri dan Syahputra (2024) serta Fadhilah et al. (2022) memberikan perhatian pada literasi digital dan etika bermedia sosial. Islamy (2021), Silaen dan Najicha (2023), serta Putri et al. (2025) menghubungkan nilai Pancasila dengan perilaku atau etika komunikasi digital. Sementara itu, Fatmawati dan Habibah (2023) serta Yusuf et al. (2024) menempatkan perilaku pengguna dalam kerangka kewarganegaraan digital. Berdasarkan kelompok literatur tersebut, ruang kajian yang dapat dikembangkan terletak pada penjelasan mengenai bagaimana setiap sila Pancasila diterjemahkan menjadi indikator perilaku etis, bagaimana proses penerapannya berlangsung dalam aktivitas media sosial, dan faktor apa saja yang mendukung atau menghambat penerapan nilai tersebut. Rumusan kesenjangan ini merupakan arah awal sintesis literatur, sehingga perlu dikonfirmasi melalui penelaahan teks lengkap dan perbandingan sistematis terhadap temuan penelitian terdahulu sebelum dinyatakan sebagai kesenjangan empiris yang definitif.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam meningkatkan etika masyarakat menggunakan media sosial. Pembahasan diarahkan pada keterkaitan lima sila Pancasila dengan perilaku komunikasi digital, bentuk penerapan nilai dalam aktivitas bermedia sosial, serta faktor pendukung dan penghambat pembentukan etika digital. Analisis ini diharapkan menghasilkan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara nilai Pancasila, literasi digital, dan kewarganegaraan digital dalam membentuk perilaku pengguna yang bertanggung jawab. Secara praktis, pembahasan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pendidik, keluarga, komunitas, dan pengelola platform dalam mengembangkan pendidikan etika digital yang sesuai dengan nilai kebangsaan. Dengan demikian, implementasi Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai dasar untuk mengevaluasi dan memperbaiki perilaku komunikasi masyarakat di ruang digital.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature study*). Metode ini bertujuan menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam meningkatkan etika masyarakat menggunakan media sosial melalui penelaahan sumber ilmiah yang relevan. Data penelitian bersumber dari artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas nilai-nilai Pancasila, etika digital, literasi digital, etika komunikasi, dan kewarganegaraan digital. Peneliti menggunakan sumber yang tercantum dalam daftar pustaka sebagai titik awal penelusuran, dengan mempertimbangkan relevansi topik, kesesuaian fokus kajian, serta ketersediaan informasi mengenai tujuan, metode, dan hasil penelitian. Penelusuran juga diarahkan untuk mengidentifikasi konsep teoretis dan temuan penelitian yang menjelaskan hubungan antara nilai Pancasila dan perilaku masyarakat di ruang digital.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan identifikasi sumber, seleksi literatur, pengelompokan informasi, interpretasi temuan, dan penarikan kesimpulan. Literatur yang terpilih dikelompokkan berdasarkan lima

silasila Pancasila, bentuk perilaku etis dalam penggunaan media sosial, serta faktor pendukung dan penghambat penerapan etika digital. Peneliti kemudian membandingkan persamaan dan perbedaan argumentasi antarsumber untuk mengidentifikasi pola temuan dan kesenjangan kajian. Hasil analisis disajikan secara deskriptif dan analitis dengan menghubungkan temuan literatur pada kerangka nilai Pancasila, literasi digital, dan kewarganegaraan digital. Melalui prosedur tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman konseptual yang sistematis mengenai peran nilai-nilai Pancasila dalam membentuk perilaku masyarakat yang santun, bertanggung jawab, dan menghargai hak orang lain ketika menggunakan media sosial.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Etika Bermedia Sosial

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan media sosial dapat dipahami sebagai penerapan prinsip moral dan kebangsaan dalam aktivitas komunikasi digital. Pancasila menyediakan kerangka normatif untuk menilai perilaku pengguna ketika menyampaikan pendapat, membagikan informasi, menanggapi perbedaan, dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks ini, etika bermedia sosial tidak hanya berkaitan dengan kesantunan berbahasa, tetapi juga mencakup kejujuran informasi, penghormatan terhadap martabat manusia, tanggung jawab sosial, dan keadilan dalam komunikasi. Islamy (2021) membahas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kode etik netizen Muhammadiyah, sedangkan Putri et al. (2025) mengkaji Pancasila sebagai paradigma pembentukan etika komunikasi digital. Kedua kajian tersebut relevan untuk menjelaskan bahwa nilai kebangsaan dapat menjadi dasar pertimbangan moral ketika masyarakat menentukan perilaku yang tepat di ruang digital.

Berdasarkan sintesis konseptual terhadap literatur yang digunakan, implementasi nilai Pancasila dapat dianalisis melalui lima dimensi perilaku, yaitu tanggung jawab moral, penghormatan terhadap martabat manusia, pemeliharaan persatuan, komunikasi demokratis, dan keadilan. Kelima dimensi tersebut membantu menghubungkan prinsip filosofis Pancasila dengan tindakan konkret pengguna media sosial. Hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Sila Pancasila	Bentuk implementasi	Indikator etika bermedia sosial
Ketuhanan Yang Maha Esa	Mengembangkan tanggung jawab moral dalam komunikasi	Tidak menyebarkan fitnah, tidak memanipulasi informasi, dan mempertimbangkan konsekuensi tindakan
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Menghormati martabat dan hak orang lain	Menghindari perundungan siber, ujaran kebencian, penghinaan, dan pelanggaran privasi
Persatuan Indonesia	Menjaga keharmonisan dalam keberagaman	Tidak menyebarkan provokasi yang memecah belah dan menghargai perbedaan identitas
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	Mengembangkan komunikasi demokratis	Menghargai perbedaan pendapat, menyampaikan kritik secara rasional, dan menghindari intimidasi
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Menjunjung kesetaraan dan keadilan digital	Tidak melakukan diskriminasi, memberikan ruang bagi pendapat yang berbeda, dan menghormati hak pengguna lain

Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap sila memiliki implikasi etis yang dapat diterapkan dalam aktivitas digital. Sila pertama mengarahkan pengguna untuk mempertimbangkan tanggung jawab moral sebelum memublikasikan konten. Sila kedua menekankan bahwa kebebasan berkomunikasi tidak membenarkan penghinaan atau tindakan yang merugikan orang lain. Sila ketiga mengarahkan pengguna untuk mempertimbangkan dampak informasi terhadap hubungan antarkelompok. Sila keempat mendukung penyampaian kritik dan perbedaan pendapat melalui dialog yang rasional. Sila kelima menuntut perlakuan yang adil terhadap pengguna lain tanpa membedakan latar belakang mereka. Dengan demikian, implementasi Pancasila dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi kualitas perilaku masyarakat di ruang digital.

2. Peran Literasi Digital dalam Membentuk Etika Masyarakat

Literasi digital memiliki hubungan konseptual dengan etika bermedia sosial karena pengguna membutuhkan kemampuan untuk mengevaluasi informasi dan memahami konsekuensi komunikasinya. Pengguna yang mampu mengakses informasi belum tentu dapat membedakan informasi faktual, opini, manipulasi konten, dan berita palsu. Oleh karena itu, literasi digital perlu mencakup kemampuan memeriksa sumber, menilai kredibilitas informasi, memahami konteks, serta mempertimbangkan dampak penyebaran konten. Fadhillah et al. (2022) mengkaji pengaruh literasi digital terhadap etika media sosial, sedangkan Alfazri dan Syahputra (2024) membahas keterkaitan literasi digital dengan etika komunikasi. Kedua penelitian tersebut relevan sebagai landasan untuk menganalisis hubungan antara kecakapan digital dan tanggung jawab pengguna.

Dalam kerangka Pancasila, literasi digital membantu pengguna menerjemahkan nilai moral ke dalam keputusan praktis. Sebagai contoh, pengguna yang menerima informasi mengenai kelompok tertentu perlu memeriksa kebenaran sumber sebelum membagikannya. Tindakan tersebut mencerminkan tanggung jawab terhadap kebenaran informasi sekaligus upaya menjaga persatuan. Ketika menghadapi perbedaan pendapat, pengguna perlu memeriksa substansi argumen dan menghindari serangan pribadi. Perilaku ini sejalan dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan prinsip musyawarah. Amril dan Sazali (2025) membahas krisis etika komunikasi digital dengan mempertimbangkan peran algoritma, literasi digital, dan regulasi. Perspektif tersebut memperluas analisis karena perilaku pengguna juga berinteraksi dengan lingkungan platform, termasuk mekanisme penyebaran dan rekomendasi konten.

Namun, literasi digital tidak secara otomatis menghasilkan perilaku etis. Pengguna dapat memahami cara memverifikasi informasi, tetapi tetap memilih menyebarkan konten provokatif untuk memperoleh perhatian atau dukungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kecakapan teknis dan pengetahuan informasi perlu disertai orientasi moral serta kesadaran akan tanggung jawab sosial. Pancasila dapat memberikan kerangka nilai untuk membantu pengguna menilai apakah suatu tindakan layak dilakukan, sedangkan literasi digital menyediakan kemampuan untuk memeriksa informasi dan memahami konteksnya. Kombinasi keduanya membentuk pendekatan yang lebih menyeluruh dalam meningkatkan etika masyarakat menggunakan media sosial.

3. Pancasila dan Penguatan Kewarganegaraan Digital

Kewarganegaraan digital (digital citizenship) menjelaskan tanggung jawab individu ketika berpartisipasi dalam ruang digital. Konsep ini mencakup penghormatan terhadap hak pengguna lain, kepatuhan terhadap norma, kemampuan berpikir kritis, dan partisipasi yang bertanggung jawab. Fatmawati dan Habibah (2023) mengkaji praktik netizenship mahasiswa dalam kerangka kewarganegaraan digital yang baik di Indonesia. Sementara itu, Yusuf et al. (2024) membahas Pancasila sebagai sumber etika digital dalam pendidikan kewarganegaraan. Kedua kajian tersebut memberikan landasan konseptual untuk menghubungkan perilaku pengguna media sosial dengan tanggung jawab sebagai warga negara.

Pancasila memperluas pemahaman kewarganegaraan digital karena memberikan orientasi nilai yang sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Pengguna tidak cukup hanya memahami hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga perlu menyadari kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Kebebasan berpendapat, misalnya, perlu berjalan bersama tanggung jawab terhadap kebenaran informasi dan penghormatan terhadap perbedaan. Kritik terhadap kebijakan publik dapat mendukung partisipasi demokratis apabila pengguna menyampaikan argumen yang relevan dan menghindari serangan pribadi. Sebaliknya, penyebaran informasi palsu dan penghinaan terhadap kelompok tertentu dapat merusak kualitas diskusi publik.

Mulyono et al. (2022) mengkaji keterlibatan warga melalui media sosial, sedangkan Mulyono et al. (2024) membahas kewarganegaraan digital melalui analisis wacana kandidat dalam Pemilihan Presiden 2024. Kedua topik tersebut relevan untuk menjelaskan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam persoalan publik. Akan tetapi, partisipasi yang tinggi belum tentu mencerminkan kualitas kewarganegaraan digital yang baik. Kualitas partisipasi juga bergantung pada kemampuan pengguna menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, mengevaluasi informasi, dan menghormati prinsip demokrasi. Oleh sebab itu, implementasi Pancasila dapat membantu mengarahkan partisipasi digital agar tidak hanya berorientasi pada kebebasan berekspresi, tetapi juga memperhatikan kepentingan bersama.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Etika Pancasila

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan media sosial dipengaruhi oleh faktor individual, pendidikan, sosial, dan teknologi. Pada tingkat individual, pengetahuan moral, kemampuan mengendalikan diri, dan literasi digital dapat membantu pengguna mempertimbangkan konsekuensi tindakannya. Pada tingkat pendidikan, pembelajaran Pancasila dapat mengembangkan pemahaman tentang hubungan antara nilai kebangsaan dan perilaku komunikasi. Pada tingkat sosial, keteladanan keluarga, lingkungan pertemanan, dan komunitas digital dapat membentuk kebiasaan pengguna. Sementara itu, karakteristik platform digital dapat memengaruhi pola interaksi dan penyebaran konten. Amril dan Sazali (2025) menempatkan algoritma, literasi digital, dan regulasi sebagai unsur yang relevan dalam pembahasan krisis etika komunikasi di media sosial.

Faktor-faktor tersebut dapat mendukung atau menghambat perilaku etis. Pendidikan yang menghubungkan konsep Pancasila dengan kasus nyata dapat membantu masyarakat mengenali tindakan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan,

persatuan, dan keadilan. Sebaliknya, pemahaman Pancasila yang hanya berfokus pada hafalan berisiko tidak memberikan bekal yang memadai untuk menghadapi persoalan digital yang kompleks. Tekanan kelompok, keinginan memperoleh perhatian, dan kecenderungan membagikan konten tanpa memeriksa kebenarannya juga dapat menghambat penerapan etika.

Dari sisi teknologi, algoritma rekomendasi dan mekanisme interaksi pada platform dapat memengaruhi konten yang dilihat serta respons yang diberikan pengguna. Namun, pengaruh teknologi tidak menghilangkan tanggung jawab individu. Pengguna tetap perlu mengevaluasi informasi, memahami konteks, dan mempertimbangkan dampak komunikasinya. Dengan demikian, peningkatan etika digital membutuhkan pendekatan yang menggabungkan pendidikan nilai, penguatan literasi digital, keteladanan sosial, dan tata kelola platform yang bertanggung jawab.

5. Strategi Peningkatan Etika Bermedia Sosial Berbasis Pancasila

Peningkatan etika bermedia sosial memerlukan strategi yang menghubungkan pemahaman nilai dengan praktik komunikasi sehari-hari. Pendidikan Pancasila dapat menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan kemampuan tersebut melalui analisis kasus, diskusi, simulasi, dan evaluasi konten digital. Peserta didik, misalnya, dapat diminta menganalisis unggahan yang mengandung informasi tidak terverifikasi, menentukan sila yang relevan, dan menjelaskan tindakan yang seharusnya mereka ambil. Aktivitas semacam ini mengarahkan pembelajaran dari penguasaan konsep menuju penerapan nilai dalam pengambilan keputusan.

Firmansyah et al. (2025) membahas hubungan etika digital dan Pancasila melalui proyek inovasi teknologi digital bagi pelajar. Nurfitriyanti dan Damayanti (2025) mengkaji pendidikan Pancasila dalam pengembangan kewarganegaraan digital dan keadaban siswa. Kedua topik tersebut mendukung pengembangan strategi pembelajaran yang menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan praktik. Dalam penerapannya, guru dapat meminta peserta didik membuat panduan pemeriksaan informasi, menyusun kampanye komunikasi santun, atau mengevaluasi contoh konflik digital berdasarkan lima sila Pancasila. Penilaian kegiatan dapat mencakup ketepatan analisis, alasan etis, kemampuan memverifikasi sumber, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat.

Selain melalui pendidikan formal, penguatan etika digital perlu melibatkan keluarga, komunitas, dan pengelola platform. Keluarga dapat membangun kebiasaan berdiskusi tentang penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Komunitas dapat menyepakati aturan komunikasi yang mencegah perundungan dan penyebaran informasi palsu. Pengelola platform dapat mendukung upaya tersebut melalui mekanisme pelaporan, kebijakan moderasi yang transparan, dan penyediaan informasi yang membantu pengguna memahami risiko konten berbahaya. Sinergi ini diperlukan karena pembentukan perilaku digital tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dalam interaksi sosial dan lingkungan teknologi yang digunakan masyarakat setiap hari.

Efektivitas strategi tersebut perlu dinilai menggunakan indikator yang dapat diamati. Indikatornya dapat meliputi kemampuan memeriksa kebenaran informasi, kesantunan berkomunikasi, penghormatan terhadap privasi, sikap terhadap perbedaan, dan kesediaan memperbaiki informasi yang terbukti keliru. Pengukuran sebelum dan sesudah program pendidikan dapat membantu menilai perubahan

pengetahuan dan perilaku peserta. Namun, peningkatan pengetahuan tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti perubahan perilaku aktual. Penelitian lanjutan perlu menggabungkan kuesioner, wawancara, observasi, atau analisis aktivitas digital yang dilakukan secara etis untuk menguji efektivitas program secara lebih menyeluruh.

6. Sintesis Literatur dan Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan sintesis konseptual, literatur yang digunakan dalam kajian ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga fokus utama. Kelompok pertama membahas literasi digital dan etika komunikasi, seperti Fadhillah et al. (2022) serta Alfazri dan Syahputra (2024). Kelompok kedua menempatkan Pancasila sebagai landasan etika digital, seperti Islamy (2021), Silaen dan Najicha (2023), serta Putri et al. (2025). Kelompok ketiga membahas kewarganegaraan digital dan partisipasi masyarakat, seperti Fatmawati dan Habibah (2023) serta Yusuf et al. (2024). Ketiga kelompok tersebut menunjukkan keterkaitan konseptual antara kecakapan digital, nilai moral, dan tanggung jawab warga dalam ruang digital.

Sintesis tersebut menghasilkan pemahaman bahwa peningkatan etika masyarakat menggunakan media sosial memerlukan integrasi tiga unsur. Literasi digital membantu pengguna mengevaluasi informasi dan memahami konteks komunikasi. Nilai-nilai Pancasila memberikan dasar moral untuk menentukan perilaku yang sesuai dengan martabat manusia, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Kewarganegaraan digital mengarahkan penerapan kedua unsur tersebut dalam bentuk partisipasi yang bertanggung jawab. Hubungan ketiganya dapat digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis perilaku masyarakat dalam penggunaan media sosial.

Meskipun demikian, kajian literatur ini belum cukup untuk menyimpulkan bahwa penerapan nilai Pancasila secara langsung meningkatkan etika masyarakat. Kesimpulan kausal memerlukan bukti empiris yang menguji hubungan tersebut. Selain itu, artikel yang dicantumkan dalam daftar pustaka perlu diperiksa melalui pembacaan teks lengkap untuk memastikan ketepatan interpretasi dan menemukan perbedaan hasil penelitian. Penelitian selanjutnya dapat menguji hubungan antara pemahaman nilai Pancasila, tingkat literasi digital, dan perilaku etis pengguna melalui survei atau pendekatan campuran. Peneliti juga dapat membandingkan kelompok pengguna berdasarkan usia, lingkungan pendidikan, atau intensitas penggunaan media sosial untuk memahami variasi perilaku secara lebih terukur.

Simpulan

Implementasi nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi konseptual dalam meningkatkan etika masyarakat menggunakan media sosial. Kelima sila Pancasila memberikan pedoman untuk membangun perilaku digital yang bertanggung jawab, menghormati martabat manusia, menjaga persatuan, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung keadilan. Penerapan nilai tersebut dapat diwujudkan melalui kebiasaan memverifikasi informasi sebelum membagikannya, menggunakan bahasa yang santun, menghormati privasi, menghindari ujaran kebencian, serta menyampaikan kritik secara rasional. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi landasan moral bagi masyarakat dalam menjalankan kebebasan berkomunikasi secara bertanggung jawab.

Berdasarkan studi literatur, penerapan etika Pancasila perlu didukung oleh penguatan literasi digital, pendidikan karakter, keteladanan lingkungan sosial, dan tata kelola platform yang bertanggung jawab. Literasi digital membantu masyarakat mengevaluasi informasi, sedangkan nilai-nilai Pancasila memberikan orientasi moral dalam menentukan tindakan yang sesuai dengan kepentingan bersama. Integrasi kedua unsur tersebut dapat menjadi kerangka untuk mengembangkan kewarganegaraan digital yang beretika. Namun, karena penelitian ini menggunakan metode studi literatur, kesimpulannya bersifat konseptual dan belum membuktikan pengaruh langsung implementasi Pancasila terhadap perubahan perilaku masyarakat. Penelitian empiris selanjutnya diperlukan untuk menguji hubungan tersebut serta mengidentifikasi strategi yang paling efektif dalam meningkatkan etika penggunaan media sosial.

Refrensi

- Akbar, M. (2025). Pancasila di era digital: Menjaga etika dan moralitas dalam demokrasi siber. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(11), 523–526.
- Alfazri, M., & Syahputra, J. (2024). Literasi digital dan etika komunikasi dalam konteks media sosial. *Jurnal Syiar-Syiar*, 4(2), 50–62. <https://doi.org/10.36490/syiar.v4i2.1555>
- Amril, A., & Sazali, H. (2025). Krisis etika komunikasi di media sosial: Analisis multidisipliner terhadap peran algoritma, literasi digital, dan regulasi dalam mewujudkan ruang publik digital yang bertanggung jawab. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 6(2), 1342–1352. <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1424>
- Anom, E. A., & Rasanjani, S. (2026). Digital ethics, cultural values, and self-regulation of social media activities in Indonesia and Malaysia. *Frontiers in Communication*, 11.
- Ardiansyah, S., Anggrawan, A., & Iskandar, D. (2026). Digital citizenship for sustainable development goals: A character-based approach in civic education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*.
- Azizah, N., Saputro, A. I., & Slam, Z. (2026). Digital Pancasila education: Reconstructing the monopluralist identity of Indonesia's Generation Z facing social media disruption. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11(1). <https://doi.org/10.36805/civics.v11i01.12167>
- Damanik, P. C. I. C., Chaled, M. I., Husaeni, R. A., Uli, A. A., & Jayanti, F. D. (2026). Reconceptualizing Pancasila-based citizenship education in the digital age: Integrating artificial intelligence, digital ethics, and project-based learning. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(1). <https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.42780>
- Fadhilah, M. N., Maryanti, R., Wulandary, V., & Irawan, A. R. (2022). The effect of digital literacy on social media ethics. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 3(1), 44–52. <https://doi.org/10.26874/jakw.v3i1.121>
- Fatmawati, F., & Habibah, S. M. (2023). Aktualisasi praktik netizenship mahasiswa dalam good digital citizenship Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(1), 70–85. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.120>

- Firmansyah, R., Hamzah, S., & Almuntarizi, A. (2025). Etika digital dan Pancasila: Sinergi transformasi pelajar melalui proyek inovasi teknologi digital. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1).
- Furqany, S., Sazali, H., Khatibah, K., Ibrahim, M. S., Almuntarizi, A., & Azmy, K. (2026). Digital ethics from a gender perspective: Media literacy and the representation of deviant behaviour on social media. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 12(1). <https://doi.org/10.22373/equality.v12i1.33037>
- Hartanto, dkk. (2026). Strengthening Pancasila-based digital ethics among Gen Z: A community service program in SMA Negeri 34 Jakarta. *Warta Pengabdian Andalas*.
- Islamy, A. (2021). Nilai-nilai Pancasila dalam kode etik netizen Muhammadiyah. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1(2), 197–210.
- Karmila, R., & Syamzaimar. (2026). Relevansi nilai-nilai Pancasila dalam era digital: Studi kasus penggunaan media sosial. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia*, 3(1).
- Mulyono, B., Affandi, I., Suryadi, K., & Darmawan, C. (2022). Online civic engagement: Fostering citizen engagement through social media. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 75–85.
- Mulyono, T., Trilatifah, W., Nasichuddin, M. A., Syambudi, I., & Trisnawati, D. (2024). Strengthening digital citizenship through discourse analysis of presidential and vice-presidential candidates in the 2024 Presidential Election. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(1), 79–89.
- Muhajir, M., Latief, A., & Tiara, M. (2025). Strengthening digital literacy and political culture for Gen-Z through Pancasila education learning in higher education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*.
- Muna, N. N., & Musyafiq, A. (2024). Etika bermedia sosial dan penyebaran informasi: Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang dapat membimbing penggunaan media sosial. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(6), 229–233.
- Nugroho, D. A., & Anwar, W. Y. C. (2022). Strategy to empower Pancasila values through podcast media as digital citizens innovation. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2).
- Nurfitriyanti, N., & Damayanti, N. (2025). Pendidikan Pancasila di era digital: Mengembangkan kewarganegaraan digital dalam membangun keadaban pada siswa. *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan*, 4(2).
- Pernantah, P. S., Supriatna, N., Komalasari, K., Nurbayani, S., Mutiani, M., & Aisiah. (2025). Philosophical reflection on Pancasila as a source of digital ethics in shaping good digital citizenship. *The Innovation of Social Studies Journal*, 7(1).
- Putri, B. A. M., Anindya, N. A., Hikmah, C. N. L. Z., Muchtar, P. F., & Sulistianingsih, D. (2025). Pancasila as a paradigm in shaping communication ethics in the digital age. *Indonesia Media Law Review*, 4(2). <https://doi.org/10.15294/imrev.v4i2.36573>
- Que, B. I. A., & Najicha, F. U. (2025). Pancasila sebagai pilar etika di dunia digital: Membangun panduan perilaku yang bermartabat di media sosial. *Borneo Law Review*, 8(1).

- Raharjo, N. P. (2025). Digital identity and ethical challenges on social media: An Islamic communication perspective. *Wasilatuna: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.38073/wasilatuna.v8i02.2280>
- Rawanoko, E. S., Komalasari, K., Al-Muchtar, S., & Bestari, P. (2021). The use of social media in ethic digital perspective. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1).
- Sari, F. L., Sari, R., & Niffilayani, A. (2025). Pancasila as the basis of digital ethics in the social media era. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 10(2).
- Sari, I., Zuriah, N., & Lutfiana, R. F. (2026). The role of TikTok and Instagram social media in strengthening Gen Z citizenship identity. *Journal of Educational Sciences*, 10(4), 965–976. <https://doi.org/10.31258/jes.10.4.p.965-976>
- Silaban, P. S. M. J., Hrp, A. K., Sinuhaji, V. Br., & Tinambunan, G. (2025). Nilai-nilai moral Pancasila sebagai landasan penggunaan media sosial. *Jurnal TIPS*, 3(1).
- Silaen, R. N., & Najicha, F. U. (2023). The implementation of Pancasila values, fair and civilized humanitarian principles in using social media. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 2(2).
- Siregar, H. (2022). Analisis pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(1), 71–82.
- Sujarwo, N. K., dkk. (2024). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam era digital dan teknologi yang terus berkembang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Yorman, Y., & Sadam, S. (2025). Pancasila as an ethics of social media to realize digital citizens. *Journal of Social Studies Education*, 1(1), 37–46. <https://doi.org/10.71094/josse.v1i1.89>
- Yosita Ratri, S., & Aviyanti, L. (2025). Unlocking digital literacy in Indonesia: Insights from the use of social media platforms. *Jurnal Prima Edukasia*, 13(1). <https://doi.org/10.21831/jpe.v13i1.83433>
- Yuliyanti, E. A., Tarsidi, D. Z., & Sukarno. (2026). Studi fenomenologi tentang penguatan digital citizenship berbasis literasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar. *Didaktika Dwija Indria*, 14(5).
- Yusuf, N., Wibowo, A. P., & Budiono. (2024). Digital citizenship education: Pancasila as a source of digital ethics in Indonesia. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 9(1). <https://doi.org/10.26618/jed.v9i1.11721>
- Zahriyanto, A., Selo, G. K., Qodir, L. J., Zihni, A. A., Rabbani, G. A. N., & Apryono, C. B. I. K. (2025). Pancasila sebagai fondasi etika sosial di era digital: Tantangan dan peluang. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4). <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4445>